

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BANJAR TAHUN 2022**

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Alasan	Penjelasan		OPD Utama	Sumber Data	Cara Pencapaian (KU (Program/Kegiatan))	Keterangan								
						Formula/Rumus Perhitungan	OPD Pendamping												
1	Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Aparatur	Indeks Profesionalitas ASN	Skor	53	Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengeluarkan Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Peraturan ini merupakan pelaksanaan teknis Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, pada 10 Mei 2019.	$\frac{(K \times P1 + L \times P2 + R \times P3 + I \times P4)}{4}$	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah	Program Kepegawaian Daerah/(1) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia / (1) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN dan Permennan RB Nomor 40 Tahun 2018									
											<p>Sistem Merit belum berjalan, sehingga dibutuhkan peningkatan pengangkatan Aparatur dalam Jabatan yang sesuai kompetensi</p>	<p>Jumlah jabatan yang diisi sesuai Kompetensi/Jumlah jabatan yang Ada</p>	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah	Program Kepegawaian Daerah/(1) Pengelolaan Promosi ASN				
											<p>Persentase Jabatan yang diisi sesuai dengan Kompetensi</p>					<p>Persentase ASN yang tidak kompeten</p>	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah	Program Kepegawaian Daerah/(1) Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur; (2) Pembinaan Disiplin; (3) Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat; (4) Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
											<p>Persentase Pelanggaran Disiplin</p>								
<p>Cakupan Pengelolaan Data dan Aplikasi Kepegawaian</p>	<p>Data Kepegawaian Daerah belum terintegrasi ke dalam Sistem Pengelolaan Kepegawaian Pemerintah Pusat, sehingga berdampak terhadap pelayanan kepegawaian diantaranya masalah Paperless dalam KPO</p>	<p>Skor SAKIP hasil rewu Instansi Terkait</p>	Inspektorat	BKPSDM	Program Perwujudan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota/ (1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
<p>Nilai SAKIP</p>	<p>Nilai SAKIP Perangkat Daerah Masih Rendah</p>					<p>68,8</p>													
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Badan	Nilai SAKIP	Skor	68,8	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Masih Rendah	Skor SAKIP hasil rewu Instansi Terkait	Inspektorat	BKPSDM	Program Perwujudan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota/ (1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										

